



## Implementasi Kebijakan Pengembangan UMKM dalam Rangka Good Local Governance (Studi pada Pemerintah Kota Samarinda)

Adri Patton<sup>1)</sup>, Enos Paselle<sup>2)</sup>, Muhammad Arif Nurrahman<sup>3)</sup>,  
Ferdinand Raffi Aditya Defiga<sup>4)</sup>, Gita Riski Aggriani<sup>5)</sup>

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman  
Kota Samarinda, Kalimantan Timur

Corresponding author: [enos.paselle@fisip.unmul.ac.id](mailto:enos.paselle@fisip.unmul.ac.id), [aarifmuhammadd@gmail.com](mailto:aarifmuhammadd@gmail.com)

### Abstrak

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, pemerintah telah membuat kebijakan yaitu dengan dikeluarkannya UU No. 20/2008 yang mengatur tentang UMKM, disusul dengan PP No. 07/2021 tentang fasilitasi, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM. Namun, kenyataan menunjukkan Pemerintah Kota Samarinda belum menindaklanjuti kebijakan-kebijakan tersebut ke dalam peraturan daerah dan peraturan lain yang lebih rendah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis instrumen kebijakan yang digunakan oleh pemerintah Kota Samarinda, partisipasi dan upaya pemangku kepentingan dalam membangun infrastruktur dan meningkatkan sumber daya manusia pelaku UMKM untuk mendukung implementasi kebijakan pengembangan UMKM dalam konteks tata kelola pemerintahan daerah yang baik. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi melalui teknik analisis data dengan menggunakan model interaktif oleh Miles, Huberman, dan Saldana. Hasil penelitian menunjukkan dalam implementasi kebijakan pengembangan UMKM, Pemerintah Kota Samarinda telah berpedoman pada instrumen kebijakan. Adanya partisipasi dan upaya stakeholder dalam implementasi kebijakan pengembangan UMKM di Kota Samarinda juga diterapkan untuk menciptakan Infrastruktur UMKM dan memajukan sumber daya manusia pelaku usaha dalam mendorong implementasi kebijakan pengembangan UMKM di Kota Samarinda.

**Kata kunci:** Good Local Governance, Kebijakan, UMKM.

### Abstract

*To realize good local governance, the government has made a policy, namely the issuance of Law No. 20/2008 regulating UMKM, followed by PP No. 07/2021 on the facilitation, protection, and empowerment of cooperatives and UMKM. However, the reality shows the Samarinda City Government has not followed up on these policies into regional regulations and other lower regulations. The purpose of this study is to analyze the policy instruments used by the Samarinda City government, the participation and efforts of stakeholders in building infrastructure and improving the human resources of UMKM actors to support the implementation of UMKM development policies in context of good local governance. This type of research uses qualitative methods and data collection is carried out by observation, in-depth interviews and documentation through data analysis techniques using the interactive model by Miles, Huberman, and Saldana. The results showed in the implementation of UMKM development policies, the Samarinda City Government has been based on policy instruments. The presence of stakeholder participation and efforts in the implementation of UMKM development policies in Samarinda City is also applied to create UMKM Infrastructure and advance the human resources of business actors in encouraging the implementation of UMKM development policies in Samarinda City.*

**Key words:** Good Local Governance, Policies, UMKM.



## PENDAHULUAN

Salah satu sektor yang berperan penting dalam proses pemulihan ekonomi adalah UMKM. UMKM sejatinya tidak dapat dipungkiri mempunyai peran penting dalam memberikan kontribusi ekonomi suatu negara, karena usaha mikro, kecil dan menengah memiliki kemampuan sebagai mesin ekonomi yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mampu memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap Gross National Product di suatu negara. Di Indonesia jumlah UMKM pada tahun 2023 mencapai 65 juta. Berdasarkan pada data sejak tahun 2019 sampai tahun 2023 selalu terjadi fluktuasi pertumbuhan jumlah UMKM di Indonesia. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2022 dengan kontribusi PDB sebesar 60,50%. Penurunan pertumbuhan jumlah UMKM di Indonesia disebabkan oleh beberapa persoalan, seperti akses pemasaran, baik ditingkat lokal, nasional maupun internasional; standarisasi produk, kemasan yang tidak menarik, lemahnya inovasi sehingga produk UMKM cukup sulit bersaing (Eddy, 2009:1). Namun perkembangan jumlah UMKM di Kalimantan Timur memperlihatkan hal yang sebaliknya mengalami peningkatan dari Tahun 2021-2023. Jumlah usaha mikro, kecil dan menengah yang terdaftar di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kalimantan Timur mencapai sebanyak 460.147.

**Tabel Jumlah UMKM di Provinsi Kalimantan Timur 2021-2023**

Nomor	Tahun	Jumlah
1.	2021	344.540
2.	2022	351. 274
3.	2023	460.147

Sumber:<https://katalog.data.go.id/dataset/data-umkm>

Kota Samarinda merupakan kota yang tergolong memiliki tingkat aktivitas ekonomi yang cukup tinggi. Cukup tingginya aktivitas ekonomi di Kota Samarinda tidak terlepas dari tingginya aktivitas masyarakat dalam masing-masing sektor ekonomi serta partisipasi stakeholder didalam mengembangkan dan menumbuhkan perekonomian yang ada di Kota Samarinda. Sektor ekonomi yang cukup memberikan kontribusi selama kurun waktu lima (5) tahun terakhir adalah sektor UMKM. Meskipun aktivitas perekonomian di Kota Samarinda cukup tinggi, namun selama kurun waktu lima (5) tahun terakhir mengalami pasang surut. Kondisi pasang surut tersebut disebabkan oleh imbas dari kondisi makro ekonomi nasional yang cenderung memburuk, terutama pada saat terjadi krisis ekonomi dan finansial global yang sangat berpengaruh kepada tingkat pertumbuhan ekonomi secara fundamental. Selain disebabkan oleh kondisi makro ekonomi nasional yang cenderung memburuk, pasang surutnya perekonomian di Kota Samarinda, juga disebabkan oleh kurangnya kesinergisan masing-masing stakeholder didalam menumbuhkembangkan aktivitas perekonomian.

Pemerintah daerah belum optimal memberikan ruang promo gratis space yang ada di bandara, terminal bus dan sarana umum lainnya, agar dapat dioptimalkan sebagai tempat galeri produk-produk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Selain lokasi khusus yang didalamnya terdapat produk-produk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dengan segala kekhasanya yang layak dikunjungi wisata domestik dan global. Oleh karena itu, pengembangan UMKM lokal Samarinda ke depan, harus memperhatikan keterlibatan (partisipasi) semua pihak (stakeholder) baik dalam tataran perumusan kebijakan maupun dalam tataran implementasinya. Hal ini dimaksudkan demi mewujudkan Kepemerintahan lokal yang baik (good local governance).

Upaya untuk mewujudkan kepemerintahan lokal yang baik (good local governance), peranan UMKM ditingkat lokal Samarinda, ternyata saat ini sedang menghadapi kendala dan tidak jarang keberadaan UMKM mudah gulung tikar. Salah satu tantangan serius UMKM ditingkat lokal adalah krisis ekonomi dan finansial global yang sangat berpengaruh terhadap tingkat

pertumbuhan ekonomi lokal secara fundamental. Tantangan utama lainnya yang menyebabkan UMKM mudah gulung tikar adalah rendahnya tingkat keterampilan dan keahlian.

Berbagai kelemahan yang ada, maka perlu dicari solusinya mengingat keberadaan UMKM sekarang ini sangat vital, terutama bagi penopang perekonomian masyarakat ditingkat lokal, solusi yang sangat berarti adalah adanya keterlibatan semua stakeholder, baik itu pemerintah, swasta, perguruan tinggi, dan masyarakat termasuk dalam hal ini adalah NGO. Partisipasi stakeholder, dapat dilakukan dalam bentuk pemberdayaan, jika partisipasi stakeholder didalam pengembangan UMKM kedepan dapat berjalan dengan baik, maka good local governance akan dapat terwujud. Dengan demikian, kesejahteraan masyarakat akan tercapai. Perwujudan keberpihakan pemerintah pada UMKM adalah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah.

Rancangan Penelitian kebijakan pengembangan UMKM saat ini belum banyak menyinggung tentang analisis implementasinya. Untuk itu, penelitian ini difokuskan untuk menganalisis dan bermaksud merekonstruksi teori implementasi Howlett dan Ramesh. Teori ini memusatkan analisisnya pada aktor-aktor beserta institusi yang terlibat didalam implementasi kebijakan pengembangan UMKM. Selain itu, penelitian ini dimaksudkan juga untuk merekonstruksi teori instrumen kebijakan de Bruijn dan Hufen dalam kaitannya dengan tinggi rendahnya kapasitas pemerintah. Hasil penelitian ini diharapkan juga mampu mengeksplor bidang kajian administrasi publik, khususnya implementasi kebijakan publik dengan model implementasi kebijakan campuran (mix) dan pendekatan mix instrument, yaitu dengan meningkatkan partisipasi stakeholder dalam rangka good local governance.



Gambar: Road Map Penelitian

Sumber: Tim Peneliti, 2024

## METODE

Penelitian dilakukan pada pertengahan tahun 2023 di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Samarinda, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda, PT. Kaltim Ventura, Komunitas Pengusaha Borneo, Akademisi Universitas Mulawarman dan Content Creator Nyaman Bannar Narasumber dalam penelitian ini. Untuk menemukan jawaban atas rumusan masalah penelitian, dipergunakan pendekatan kualitatif.

Pendekatan kualitatif bertujuan untuk menganalisis instrumen kebijakan yang digunakan oleh pemerintah Kota Samarinda, partisipasi dan upaya pemangku kepentingan dalam membangun infrastruktur dan meningkatkan sumber daya manusia pelaku UMKM untuk mendukung implementasi kebijakan pengembangan UMKM dalam konteks tata kelola pemerintahan daerah yang baik. Melalui pendekatan kualitatif ini, peneliti akan menyelidiki, mengeksplorasi, dan memahami makna yang diberikan baik individu maupun kelompok pada suatu situasi sosial (Creswell, 2015), khususnya pada implementasi kebijakan pengembangan UMKM di Kota Samarinda. teknik pengumpulan sampling didasarkan atas kriteria atau pertimbangan yang digunakan oleh penulis, dikarenakan sampel yang telah ditetapkan dianggap lebih mengetahui dan memahami masalah yang terjadi dilingkungan kerjanya.

Menurut Miles dan Hubberman (2014;16), analisa data terdiri dari tiga alur, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Tetapi, sebelum dilakukan tiga (3) analisa tersebut, dilakukan kegiatan pendahuluan, yaitu pengumpulan data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Samarinda sebagai kota jasa dan perdagangan memiliki perkembangan penduduk yang setiap tahunnya mengalami kemajuan sehingga membuat jumlah permintaan turut meningkat. Hadirnya UMKM tentu dapat menjadi faktor penggerak perekonomian yang strategis di Kota Samarinda. UMKM dapat berkembang pesat karena untuk memulai usahanya tidak memerlukan modal dan SDM yang banyak, khususnya usaha mikro dan kecil.

Dalam hal ini Pemerintah Kota Samarinda harus berupaya mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memfasilitasi pelaku usaha untuk berusaha di UMKM. Akan tetapi, jika perkembangannya tidak diawasi oleh pemerintah Kota Samarinda akan berpeluang menentang tata ruang di Kota Samarinda. Menurut Data dari Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian tercatat jumlah UMKM di Kota Samarinda meningkat pada tahun 2022 ke tahun 2023 hal ini Terlihat pada tahun 2022, jumlah UMKM di Kota Samarinda mencapai angka 43.431 dan terjadi peningkatan tahun 2023 yakni sebanyak 45.012 UMKM di Kota Samarinda. Hal ini membuktikan bahwa besarnya keinginan masyarakat untuk berwirausaha dalam UMKM sehingga diperlukan pembinaan dan pelatihan oleh pemerintah Kota Samarinda agar usaha tersebut dapat beradaptasi terhadap perubahan dan berkembang secara berkelanjutan.

**Tabel Jumlah UKM Berdasarkan Jenis Usaha Kota Samarinda 2022**

No	Kecamatan	JENIS USAHA UKM 2022						
		Kuliner	Fashion	Pendidikan	Agrobisnis	Otomotif	Intemet	Lainnya
1	Samarinda Ilir	1.943	655	6	975	89	69	972
2	Samarinda Utara	1.852	627	9	1.386	130	36	1.985
3	Samarinda Ulu	2.237	411	31	2.035	132	74	458
4	Sungai Kunjang	2.081	468	3	545	36	31	2.012
5	Samarinda Seberang	990	406	5	485	49	21	816
6	Palاران	1.004	378	4	1.276	84	15	846
7	Sambutan	1.719	548	3	1.322	104	41	1.043
8	Sungai Pinang	2.237	1.107	4	1.508	84	54	600
9	Samarinda Kota	765	226	5	274	40	29	298
10	Loa Janan Ilir	1.283	489	3	1.328	69	28	553
JUMLAH		16.111	5.315	73	11.134	817	398	9.583

Sumber : Diskumi Kota Samarinda, 2024

**Tabel Jumlah UKM Berdasarkan Jenis Usaha Kota Samarinda 2023**

No	Kecamatan	JENIS USAHA UKM 2023						
		Kuliner	Fashion	Pendidikan	Agrobisnis	Otomotif	Intemet	Lainnya
1	Samarinda Ilir	1.997	675	5	975	97	70	1.037
2	Samarinda Utara	1.891	631	10	2.396	137	36	2.068
3	Samarinda Ulu	2.329	426	32	2.044	141	80	556
4	Sungai Kunjang	2.163	480	3	548	42	38	2.131
5	Samarinda Seberang	1.076	440	5	485	54	21	992
6	Palاران	1.030	391	4	1.280	88	16	938
7	Sambutan	1.746	554	3	1.331	110	42	1.092
8	Sungai Pinang	2.296	1.121	6	1.510	93	54	728
9	Samarinda Kota	786	228	5	274	40	29	308
10	Loa Janan Ilir	1.291	490	3	1.328	69	28	589
JUMLAH		16.605	5.436	76	11.171	871	414	10.439

Sumber : Diskumi Kota Samarinda, 2024

## Instrumen Regulasi (Compulsary Instrument)

Howlet dan Ramesh menjelaskan Compulsary Instrument berfokus pada kewenangan pemerintah. Instrumen ini bersifat wajib karena mampu mengungkap zona konstitusi yang menyeluruh dengan mengarahkan perilaku secara langsung yang tertuju pada kelompok perorangan atau perusahaan dengan dasar kebijaksanaan (Pratiwinegara, 2015). Dalam menjalankan kewenangan kedaulatannya, pemerintah dapat menggunakannya sebagai daya ungkit untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu, atau dapat menciptakan perusahaan-perusahaan yang dikontrak oleh pemerintah untuk melaksanakan semua fungsi yang telah ditetapkan, atau secara diam-diam menyediakan barang dan jasa yang tunduk pada kontrol

melalui birokrasi. Regulasi menjadi penting untuk strategi politik yang masuk akal, masyarakat umum atau subsistem pemerintah harus dapat mengamati tindakan yang cepat dan tegas sebagai bagian dari pemerintah. Regulasi dimaksudkan sebagai acuan dasar untuk pendukung implementasi kebijakan pengembangan UMKM di Kota Samarinda. Tak hanya itu, Regulasi juga memiliki tujuan menormalisasi dan menjamin perilaku stakeholder yang sangat beragam, agar tujuan dari sebuah kebijakan tersebut dapat tercapai.

Berdasarkan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pemerintah Indonesia telah menghadirkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai pedoman dalam upaya pengembangan UMKM dengan fokus peningkatan teknik produksi, kemampuan manajemen, pengadaan sarana prasaran, serta mendorong penerapan standarisasi proses produksi. Menindaklanjuti kebijakan terkait pengembangan UMKM, pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pemerintah Kota Samarinda sebagai regulator juga telah menetapkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai dasar dalam melakukan pemberdayaan serta pengembangan UMKM di Kota Samarinda.

Pemerintah Kota Samarinda diwakili oleh Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian sebagai pelaksana kebijakan memiliki beberapa program pengembangan yang mengacu pada regulasi tersebut diantaranya :

1. Penyediaan fasilitas pembinaan dan pelatihan, Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian melaksanakan program pembinaan dan pelatihan melalui kegiatan sosialisasi serta bimbingan teknis untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan pelaku usaha agar memiliki daya saing yang bermutu dengan melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun pihak lain sebagai narasumber yang sesuai dengan bidang serta kapasitasnya.
2. Pembuatan perizinan, pemerintah kota Samarinda melalui Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian membantu serta mengarahkan pelaku usaha dalam pembuatan Nomor Izin Berusaha (NIB) berbasis resiko melalui Online Single Submission (OSS) yang dikendalikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). NIB berguna untuk memudahkan pelaku usaha dalam menetapkan legalitas usaha serta mengurus perizinan lainnya. Data penelitian menunjukkan pada tahun 2023 jumlah pelaku usaha yang telah memiliki NIB di Kota Samarinda sebanyak 16.636 atau telah melampaui target dari Pemerintah Kota Samarinda yakni 10 ribu pelaku usaha dengan kepemilikan NIB.

**Tabel Jumlah Pemilik NIB Kota Samarinda Tahun 2023**

Triwulan	Jumlah Pemilik NIB
Triwulan 1 (Januari – Maret)	3.491
Triwulan 2 (April – Juni)	3.953
Triwulan 3 (Juli – September)	5.620
Triwulan 4 (Oktober – Januari)	3.572
<b>Total</b>	<b>16.636</b>

Sumber: DISKUMI Kota Samarinda, 2024

Berdasarkan data tabel diatas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2023 terdapat 16.636 pelaku usaha yang mendaftar Nomor Izin Berusaha (NIB) baru, dari keseluruhan jumlah tersebut jumlah pelaku usaha yang mendaftar NIB paling banyak terjadi pada triwulan 3 yakni rentang dari bulan juli hingga September.



3. Sarana permodalan, untuk membantu pelaku usaha mendapatkan dukungan pengembangan berupa modal usaha, Pemerintah Kota Samarinda memiliki program Kredit Bertuah bagi usaha mikro dengan bunga 0%, yang disalurkan melalui Bank Kaltimara.
4. Pemasaran, dalam membantu penyediaan akses dan perluasan pasar produk pelaku usaha, Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian membuat surat edaran yang ditujukan kepada retail, hotel, dan pasar modern untuk memberikan akses bagi produk UMKM masuk, selain itu juga dalam perluasan pasar Pemerintah Kota Samarinda melakukan ekspansi produk UMKM ke luar kota seperti ke Sarinah dan Bandara Yogyakarta.

### **Instrumen Perangsang Finansial (Mixed Instrument)**

Howlet dan Ramesh menjelaskan Instrumen campuran adalah Kombinasi antara instrumen wajib dengan tujuan yang jelas dan instrumen sukarela dengan rasa kebersamaan dan altruisme yang kuat. Instrumen ini memberikan pemerintah berbagai pilihan untuk menentukan puncak dari penghentian aktor non-pemerintah dan mengurangi penghentian akhir aktor tersebut (Keiky, 2016). Hanya dengan menyebarkan informasi, hukuman, dan perpajakan suatu kegiatan yang tidak diinginkan, pemerintah dapat terlibat. Dalam instrumen ini, subsidi didefinisikan sebagai transfer dana dalam bentuk uang kepada individu, organisasi, bisnis, atau pihak lain di bawah otoritas pemerintah. Subsidi juga dapat digambarkan sebagai suatu jenis kontribusi dalam bentuk uang yang diberikan pemerintah. Kaitannya dengan Implementasi Kebijakan Pengembangan UMKM di Kota Samarinda, Subsidi diberikan pemerintah kepada perseorangan maupun perusahaan atau organisasi sebagai pendukung implementasi kebijakan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Hasil penelitian menunjukkan pemerintah sebagai fasilitator diantaranya DISKUMI dan DPMTPS Kota Samarinda telah melakukan berbagai macam kegiatan yang diturunkan dari program-program dalam melakukan pengembangan UMKM di Kota Samarinda dengan memberikan bantuan berupa keringanan pembiayaan perbankan serta sertifikasi hingga pada digitalisasi produk melalui marketplace yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan usaha dalam jangkauan pasar menuju pemasaran nasional hingga internasional. Bantuan dana dari DISKUMI Kota Samarinda telah dilakukan sejak pandemi covid yang diberikan langsung oleh pusat bantuan dana usaha produktif akan tetapi bantuan ini hanya untuk usaha mikro. Oleh karena itu, Pemerintah Kota telah menghadirkan program kredit bertuah yang bekerja sama dengan bank kaltimara dan sudah berjalan dari tahun 2022.

### **Instrumen Sukarela (Voluntary Instrument)**

Howlet dan Ramesh menyatakan bahwa ciri khas dari instrumen sukarela menekankan pada partisipasi masyarakat yang menyebabkan kecilnya intervensi pemerintah dalam suatu kebijakan. Instrumen ini berfungsi sebagai alat yang berguna ketika pemerintah melakukan proses privatisasi. Setiap masalah publik yang dianggap dapat dipercaya oleh pemerintah dapat diselesaikan secara efektif oleh masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat (Keiky, 2016).

Kaitannya dengan Kebijakan pengembangan UMKM di Kota Samarinda, Instrumen ini dimaksudkan untuk melihat tinggi rendahnya keterlibatan pemerintah, serta mengkaji peran pemerintah untuk memberdayakan organisasi volunteer, seperti LSM. Hasil penelitian menunjukkan Pemerintah Kota Samarinda sebagai fasilitator mendorong pengembangan UMKM di Kota Samarinda dengan menghadirkan program KOPIANDI yang merupakan program asik ngobrol diskusi untuk membicarakan masalah ekspansi dengan mengundang ahli yang kompeten dan membuka forum dialog dengan pelaku usaha untuk mengkomunikasikan kendala yang dirasakan oleh mereka. Tidak hanya itu, Pemerintah juga berbicara melalui radio dan RRI untuk menginformasikan program kerja yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam mengembangkan UMKM di kota Samarinda.

Adanya pembinaan dan pelatihan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Samarinda bekerja sama dengan Disnaker Kota Samarinda dan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas seperti pelatihan membuat pelatihan pemanfaatan eceng gondok disertai sertifikasi. Hal ini sebagai



upaya Pemerintah Kota Samarinda dalam meningkatkan kapasitas kemampuan SDM sesuai kompetensi dan Kualifikasi yang dapat membantu masyarakat lokal untuk mencari pekerjaan sehingga tercipta good local governance dalam pengembangan UMKM di Kota Samarinda.

## **Partisipasi Stakeholder Dalam Mengimplementasikan Kebijakan Pengembangan UMKM di Kota Samarinda**

Partisipasi sebagai respon terhadap kebutuhan untuk memperkuat demokrasi melalui proses desentralisasi, yang mengurangi kebutuhan perencanaan dari bawah ke atas (bottom-up) dengan melibatkan masyarakat untuk prosedur pembangunan kepada masyarakat (Aulia, 2016). Tahapan penting dalam partisipasi adalah mempengaruhi pengambilan keputusan dengan melibatkan peran dari stakeholder seperti pemerintah, swasta, Masyarakat, akademisi dan media massa. Masyarakat memiliki peran untuk mempengaruhi prosedur kebijakan publik meliputi pemantauan dan penegakan prinsip-prinsip good governance. Pihak-pihak yang berpartisipasi dalam penerapan kebijakan pengembangan UMKM di Kota Samarinda diantaranya pemerintah diwakili oleh DISKUMI Kota Samarinda sebagai leading sector yang mempunyai kekuatan besar dalam pengambilan keputusan dan harus bekerja sama dengan ke lima pihak untuk saling berkolaborasi dalam rangka mendorong pengembangan UMKM Kota Samarinda.

Pemerintah sebagai regulator dilihat dengan telah ditetapkan Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai dasar dalam melakukan pemberdayaan serta pengembangan UMKM di Kota Samarinda sebagai landasan dalam pembuatan program, penyediaan fasilitas, dan menjalankan tugas pengawasan dalam pengembangan UMKM di Kota Samarinda. DISKUMI Kota Samarinda juga sebagai fasilitator forum dialog dengan pelaku usaha untuk mengkomunikasikan kendala dalam perizinan serta pemberian pelatihan dan pembinaan untuk meningkatkan skill masyarakat lokal untuk memudahkan mereka mencari pekerjaan dan peningkatan saturasi tenaga kerja lokal di Kota Samarinda. DPMPSTSP Kota Samarinda sebagai pengelola pelayanan administrasi di bidang perizinan melalui OSS. DPMPSTSP Kota Samarinda turut memfasilitasi sosialisasi kemudahan perizinan dan pendampingan terkait kelengkapan perizinan hingga pelaporan LKPN. Pemerintah dalam prosesnya perlu melibatkan sektor swasta sebagai pemangku kepentingan yang mampu memberikan kontribusi aktif dalam pembangunan ekonomi kerakyatan.

Pihak swasta sebagai enable yang berperan dalam rangka menghidupkan kembali kondisi UMKM yang terpuruk ini serta terus mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Terdapat banyak pelaku usaha yang masih belum tersentuh oleh bank seperti permintaan pengajuan pinjaman dana dan bahkan ditolak karena rekomendasi bank yang tidak memungkinkan mereka menjadi nasabahnya. Partisipasi swasta dalam pengembangan UMKM di Kota Samarinda dalam hal ini PT. Kaltim Ventura berkontribusi untuk membantu meningkatkan usaha para pelaku UMKM yang telah memiliki usaha namun belum memiliki modal yang cukup. Hadirnya organisasi non pemerintah atau komunitas yang turut serta dalam pengembangan UMKM di Kota Samarinda

Komunitas Pengusaha Boneo (KPB) merupakan komunitas binaan dari DISKUMI Kota Samarinda, KPB berperan dalam menjebatani stakeholder untuk membantu UMKM meningkatkan pendapatan usaha melalui penyebaran informasi, pembinaan, pendampingan hingga distribusi bantuan baik fasilitas maupun pendanaan dari OPD terkait untuk mendukung kemajuan usaha dari pelaku UMKM. Kemudian Adanya partisipasi dari Komunitas GEKRAF Kaltim yang berperan untuk mempromosikan produk dan memberikan pelayanan sebagai koperasi yang mewadahi pelaku UMKM untuk menjadi anggota dan distributor terkhusus pada era digital saat ini.

Pengembangan UMKM Kota Samarinda melalui promosi media menjadi penting dalam rangka meningkatkan eksistensi UMKM agar dapat diketahui secara luas oleh publik. Content creator memanfaatkan platform media sosial seperti facebook, youtube, tik-tok, maupun instagram sebagai sarana publikasi, hal ini dilakukan karena melalui platform media sosial tersebut dapat menjangkau banyak orang melalui insight dari setiap konten yang dibuat. Selain itu pemanfaatan



media sosial juga mampu meningkatkan engagement melalui aktivitas interaksi antara pengguna dengan unggahan. Berdasarkan hasil penelitian salah satu content creator di Kota Samarinda yang turut berpartisipasi dan memanfaatkan media sosial sebagai sarana publikasi yaitu @nyamanbannar. Melalui media sosial instagramnya akun instagram @nyamanbannar membuat konten tentang riview makanan UMKM serta membantu mempromosikannya.

Pemangku kepentingan adalah entitas internal dan eksternal, seperti pemerintah, masyarakat sekitar, lingkungan, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi serupa, organisasi lingkungan, kelompok minoritas, dan sebagainya, yang keberadaannya mempengaruhi dan dipengaruhi oleh masyarakat (Suking et al., 2023). Hasil penelitian menunjukkan adanya upaya stakeholder diantaranya yakni pemerintah, swasta, masyarakat, akademisi dan media massa untuk menciptakan Infrastruktur UMKM dan mengembangkan SDM pelaku usaha untuk turut mendukung implementasi kebijakan Pengembangan UMKM di Kota Samarinda. Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah melalui Dinas Koperasi UKM, dan Perindustrian Kota Samarinda diantaranya melalui program kredit bertuah yaitu program penyediaan permodalan bagi pelaku UMKM yang akan mendirikan usaha dengan jaminan bunga nol persen dan dapat dikembalikan dalam jangka waktu atau tenor selama 2 tahun. Melalui program kredit bertuah ini pelaku UMKM dapat memperoleh pinjaman modal dengan kisaran 1 hingga 25 juta disalurkan melalui Bank Kaltimara yang sebelumnya telah dilakukan tahapan survey yang memastikan pelaku usaha dapat memenuhi syarat untuk memperoleh pembiayaan.

Komunitas dapat berdampak secara langsung atau tidak langsung pada kinerja usaha UMKM Kota Samarinda. Langkah GEKRAF Kaltim sebagai koperasi dengan menciptakan website untuk memasarkan produk pelaku UMKM, Website ini menjadi sarana dalam pemasaran dan penjualannya tidak terbatas di lokal saja namun jangkauannya luas. Berbagai macam produk dimulai dari makanan hingga hasil pertanian dan perkebunan juga ada di pasarkan pada website tersebut. Komunitas GEKRAF Kaltim ini tidak hanya membantu memasarkan produk anggota koperasi tetapi juga membantu anggota untuk dapat menjadi distributor barang kepada pelanggan. GEKRAF Kaltim turut melakukan kerjasama dengan DISKUMI Kota Samarinda untuk dilibatkan dalam kunjungan kerja dan menyampaikan kebijakan yang telah dibuat dalam pengembangan UMKM di Kota Samarinda. PT. Kaltim Ventura turut serta dalam pengembangan UMKM dengan menyalurkan kredit dengan semurah-murahnya sehingga usaha para pelaku UMKM dapat tumbuh dan bisa berjalan sembari mengumpulkan kembali modal yang telah diberikan.

## **SIMPULAN DAN REKOMENDASI**

UMKM sejatinya tidak dapat dipungkiri memainkan peran penting dalam perekonomian suatu negara, karena dapat menjadi penggerak ekonomi yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap produk nasional bruto suatu negara. Tingginya kegiatan ekonomi di Kota Samarinda tidak terlepas dari tingginya aktivitas masyarakat dalam sektor ekonomi serta partisipasi stakeholder didalam mengembangkan perekonomian yang ada di Kota Samarinda. Hal ini dapat dimaksudkan agar mewujudkan good local governance sebagai praktik terbaik dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan lokal yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, kebijakan publik yang demokratis dan transparan, adanya partisipasi, responsiveness, kompetensi dan akuntabilitas. Berkenaan dengan perwujudan pemerintahan lokal yang baik, hal ini dapat dilihat pada kesiapan instrumen kebijakan UMKM, infrastruktur UMKM dan sumber daya manusia UMKM, serta partisipasi stakeholder yang dapat membangun kebijakan pengembangan UMKM dalam rangka mewujudkan good local governance sebagai berikut: Instrumen Regulasi (Compulsary Instrument), Instrumen Perangsang Finansial (Mixed Instrument), Instrumen Sukarela (Voluntary Instrument), Partisipasi Stakeholder didalam Mengimplementasikan Kebijakan Pengembangan UMKM di Kota Samarinda, Upaya Stakeholder didalam Membangun Infrastruktur UMKM dan Meningkatkan SDM Pelaku UMKM untuk Turut Mendukung Implementasi Kebijakan Pengembangan UMKM Kota Samarinda,



## REKOMENDASI

Dari kesimpulan di atas, dapat disampaikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Samarinda perlu memperkuat kerangka hukum dan regulasi terkait kebijakan pengembangan UMKM di Kota Samarinda, termasuk perlindungan hukum dan hak-hak bagi UMKM. Hal ini dapat dilakukan melalui penyusunan dan penegakan peraturan yang jelas dan berlaku adil bagi semua pihak terkait.
2. Pemerintah Kota Samarinda perlu mendorong pihak swasta untuk memperluas jaringan bisnis dan peluang pasar dengan memberdayakan komunitas lokal melalui pelatihan, pendidikan, atau program pengembangan kapasitas yang berfokus pada UMKM di Kota Samarinda dan menyediakan program kredit mikro dengan syarat yang fleksibel dan bunga rendah untuk membantu UMKM dalam mendapatkan modal kerja atau mengembangkan usaha mereka.
3. Pemerintah Kota Samarinda perlu menyediakan pusat layanan informasi untuk membantu UMKM memahami regulasi, perizinan, dan sumber daya yang tersedia informasi kemudahan dalam pembuatan perizinan di Kota Samarinda sehingga mereka dapat memulai dan menjalankan usaha dengan lebih cepat dan sederhana.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2008. *Analisa Kebijakan Publik*. Cetakan II. Penerbit PT. Danar Wijaya. Samarinda Negara. Cetakan ke 6. Edisi Ke 2. Penerbit Bumi Aksara. Jakarta
- Aulia, G. (2016). Stakeholder participation in the implementation of the Adiwiyata program at SMP Negeri 4 Bojonegoro. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 4(3), 1–10.
- Bogason, Peter. 2001. *Public Policy and Local Governance. Institution in Post Modern Society*. Sage Publication. Cheltenham
- DeLeon, Peter & Linda deLeon. 2001. "What Ever Happened to Policy Implementation? An Alternative Approach", *Journal of Public Administration Research and Theory*, J-PART 12
- Denhardt, Robert and Janet Denhardt. 2003. *The New Public Service*. M, E, Sharpe. New York
- Devina, A. C., Sari, P., Darmawan, R. F., & Husada, P. Y. (2023). Kota Samarinda Dalam Samarinda Dalam Angka (Samarinda Municipality in Figures) 2023. Kota Samarinda Dalam Angka.  
<https://samarindakota.bps.go.id/publication/2022/02/25/9bccd10b81b1be9b0637bf8e/kota-samarinda-dalam-angka-2022.html>
- Dwiyanto, Agus. 2009. *Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan dan Pelayanan Publik: Kajian tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia*. Penerbit Gaya Media. Yogyakarta
- Hajer, Maarten dan Henrik Wagenaar. 2003. *Deliberative Policy Analysis, Understanding Governance in the Network Society*. Combridge University Press.
- Hill, Michael dan Peter Hupe. 2006. *Implementing Public Policy*. Sage Publication. London
- Innes, Judith E. dan David E. Booher. 2003. *Collaborative Policy Making: Governance Through Dialogue in Maarten Hajer dan Hendrik Wagenaar (end) Deliberative Policy Analysis, Understanding Governance in the Network Society*. Combridge University Press
- Islamy M. Irfan. 2007. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Cetakan V. Penerbit Bumi Aksara. Jakarta
- Jusuf, Eddy, H. 2019. *Potensi Dasar Industri Ekonomi Kreatif*. Harian Pikiran Rakyat. Jakarta
- Keban, Yeremias. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu*. Penerbit Gaya Media. Yogyakarta
- Keiky, R. Y. (2016). Instrumen Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Studi Proses Perumusan dan Analisis Karakteristik Instrumen Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Bojonegoro). *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 4(2), 116–125.
- Lembaga Administrasi Negara RI. 2000. *Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. LAN dan BPKP. Jakarta
- Linders, S. dan G. Peters. 1989. "Instrumental of Government". *Journal of Public Policy*. 9



- Nugroho, Riant. 2008. Analisis Kebijakan. Penerbit Gramedia. Jakarta
- Osborne, David and Ted Gaebler. 1992. Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector. A William Patrick Book. New York
- Parson, Wayne. 2005. Terjemahan, Public Policy: Pengantar Teori dan Pratik Analisis Kebijakan. Prenada Media. Jakarta
- Peters B. Guy and Frans K.M. van Nispen. 1998. Public Policy Instrument Evaluating the Tools of Public Administration. USA. Massachusetts.
- Pratiwinegara, A. I. (2015). Studi Instrumen Kebijakan Gerakan Terpadu Kesehatan, Ekonomi, Pendidikan, Lingkungan, Infrastruktur (Gerdu Kempling) Kelurahan Bulusan Kota Semarang. Indonesian Journal of Public Policy and Management Review, 4(2), 287–296.
- Soenarko. S. D. 2002. Public Policy, Pengertian Pokok untuk Memahami dan Menganalisis Kebijakan Pemerintah. Airlangga University Press. Surabaya
- Suking, A., Huludu, C. R., & Arifin. (2023). Partisipasi Stakeholder Dalam Mendukung Implementasi Sekolah Penggerak. Equity In Education Journal, 5(2), 115–120. <https://doi.org/10.37304/eej.v5i2.10608>
- Thoha, Miftah. 2003. Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara. Penerbit Persada. Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2008. Ilmu Administrasi Publik Kotemporer. Cetakan I. Kencana Prenada Media Group. Jakarta
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
- Utomo, Warsito. 2005. Administrasi Publik Indonesia di Era Demokrasi Lokal, Bagaimana Semangat Kompatibilitas Menjiwai Budaya Birokrasi: Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UGM. Yogyakarta
- Wibawa, Samodra. 2005. Reformasi Administrasi, Bunga Rampai Pemikiran Administrasi Negara/Publik. Penerbit Gaya Media. Yogyakarta
- Widodo, Joko. 2008. Analisis Kebijakan Publik. Cetakan ke II. Penerbit Bayumedia Publishing. Samarinda
- Winarno, Budi. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Penerbit Media Presindo. Yogyakarta